

SILABUS

A. Identitas Mata Kuliah:

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Mata Kuliah | : | Kebijakan Pendidikan |
| 2. Kode Mata Kuliah | : | ADM 531 |
| 3. Bobot SKS | : | 3 |
| 4. Semester | : | 7 |
| 5. Prasyarat Mata Kuliah | : | a. Pengelolaan Pendidikan
b. Perundang-undangan Pendidikan |
| 6. Penanggung jawab | : | Dr. Aan Komariah |
| Anggota Tim/Asisten *) | : | Drs.Dedy Ahmad Kurniadi, M.Pd |

B. Deskripsi Mata Kuliah

Kebijakan pendidikan merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman dan keahlian komprehensif kepada mahasiswa secara konseptual dan praktis mengenai teori kebijakan dan kebijakan pendidikan serta analisisnya secara utuh pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi satau kebijakan pendidikan.

C. Tujuan

Secara umum mata kuliah kebijakan pendidikan bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam kepada mahasiswa tentang konsep kebijakan pendidikan serta penerapannya dalam analisis kebijakan pendidikan.

Secara khusus mata kuliah ini bertujuan untuk:

1. memberi pengertian akan pentingnya kebijakan dalam pembangunan pendidikan
2. membekali mahasiswa kemampuan memahami konsep kebijakan dan kebijakan pendidikan
3. memfasilitasi mahasiswa untuk memahami analisis kebijakan pendidikan
4. membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang formulasi kebijakan pendidikan
5. membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang implementasi kebijakan pendidikan

6. membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan
7. Memfasilitasi mahasiswa menemukan dan menunjukkan berbagai kebijakan pendidikan
8. mendorong mahasiswa untuk menerapkan analisis kebijakan pada kebijakan kebijakan pendidikan.

D. Sistem Perkuliahan

Kuliah dimulai dengan membuat komitmen belajar dengan mahasiswa yang dikenal dengan BLC (*building learning commitment*) yang membahas tentang prosedur dan peraturan kuliah, materi, evaluasi dan proses belajar mengajar.

Tawaran dari dosen sesuai dengan silabus, namun dalam BLC didefinisi kembali. Secara umum perkuliahan terdiri atas layanan individual, aktifitas aktif mahasiswa untuk mencari bahan dan berbagai kajian dari referensi buku maupun dari hasil browsing. Bahan-bahan dan kasus-kasus yang ditemukan dibahas dosen secara komprehensif dengan interaksi yang kental dari mahasiswa. ditindaklanjuti dengan diskusi.

Kuliah praktek diarahkan pada analisis kebijakan dari sudut formulasi, implementasi dan evaluasi dengan menggunakan metodologi penelitian sosial suatu kebijakan (*discovery learning*)

Akhir kuliah adalah presentasi hasil penelitian.

E. Tugas-Tugas

1. koleksi konsep kebijakan, kebijakan pendidikan, dan analisis kebijakan
2. kembangkan analisis kebijakan dalam bidang pendidikan sebagai ilmu sosial terapan
3. tetapkan prosedur analisis kebijakan dengan metodologi yang sesuai dengan substansi kebijakan pendidikan.
4. buat laporan analisis kebijakan dengan menggunakan metodologi penelitian.

F. Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada proses dan hasil. Evaluasi pada proses adalah identifikasi mahasiswa yang memiliki responsibilitas tinggi secara tindakan dan nalar dalam mencari, menemukan dan debat hasil tugas-tugas.

Format evaluasi proses yang digunakan untuk mengamati dan menyimak respon-respon siswa yang menanggapi, bertanya, menjawab permasalahan-permasalahan atas alasan perlunya kebijakan dengan menggunakan format berikut:

No	Nama mahasiswa	Bentuk Partisipasi			Penghargaan				
		1	2	3	++	+	0	-	--

Ket. Bentuk Partisipasi:

1. menanggapi jawaban permasalahan yang diajukan dosen/mahasiswa lain
2. bertanya
3. menjawab

Penghargaan:

- ++ : tajam, orsinil, inovatif
 + : tajam, merujuk pada kepustakaan
 0 : tidak berisi hal-hal esensial
 - : bertele-tele dan tidak menjawab permasalahan
 - - : mementahkan permasalahan

Evaluasi hasil adalah kajian terhadap hasil studinya yang tertuang dalam laporan hasil penelitian mandiri.

G. Sumber-sumber Rujukan

- ❑ Agus Dwiyanto dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Pusat Studi kependudukan dan Kebijakan*. Universitas Gajah Mada, 2002.
- ❑ Ali Imran. 1993. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- ❑ Denhardt, Janet V. & Denhardt, Robert B., *The New Public Services: Serving, Not Steering*. ME Sharpe, Armond, New York. 2003.

- ❑ Dun William. 1981. *Public Policy Analysis; An Introduction*, New York:Prentice-Hall,Inc
- ❑ Dye, N., Thomas. 1976. *Policy Analysis, What Government Do,Why Do They It, and What Difference it Makes*. Alabama: The Univ of Alabama
- ❑ ----.1984.*Understanding Public Policy*.New York:Prentice-Hall
- ❑ Guthrie, James, W. Reed, Roney, J. 1986. *Educational Administration and Policy, Effective Leadership for american Education*. New Jersey: Prentice-Hall.
- ❑ Holzer, Marc and Callahan, Kathe. *Government at Work: Best Practices and Model Programs*. Sage Publications. London.1998.
- ❑ Houg. 1985. *Educational Policy*. New York: Mc Graw-Hill
- ❑ Hogwood, Brian, W. 1984. *Policy Analysis for The Real World*. London:Oxford Univ
- ❑ Hadari Nawawi.1999. *Kebijakan pendidikan di Indonesia ditinjau dari sudut hokum*, Jogjakarta: Gajahmada University Press
- ❑ Jones, O. Charles. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali
- ❑ Kerr, Donna H.1976 *Educational Policy, Analysis, Structure, and Justification*.New York: David McKay Company.
- ❑ Mann, Dale. 1975. *Policy Decision Makinbg in Education*.New York: Teacher College Press.
- ❑ Majchrzak, Ann.1984. *Method for Policy Research*. Beverly Hills:Sage
- ❑ M.Irfan Islami.1997. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- ❑ Pal, Leslie.1996.*Public Policy Analysis; An Introduction*. Canada: Nelson
- ❑ Patton, Carl., Sawicki., Davis S. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Engliwood
- ❑ Parsons, Wayne. 2000. *Public Policy*. New Jersey: Engliwood
- ❑ Ledivina V. Carino “*Administrative Accountability*.” A Riview of a Key Concept in Public Administration.”
- ❑ Referensi lain yang dapat dicari di website.
- ❑ Supandi & Sanusi. 1988. *Kebijakan & Keputusan Pendidikan*.Depdikbud: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan
- ❑ Solihin Abdul Wahab.1997., *Analisis Kebijakan, dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta : Bumi Aksara

H. Rincian Kegiatan dan Materi setiap Pertemuan

Pertemuan 1 : Konsep kebijakan

Pertemuan 2 : Konsep kebijakan pendidikan

Pertemuan 3 : Analisis kebijakan

- Pertemuan 4 : Formulasi kebijakan
- Pertemuan 5 : Implementasi kebijakan
- Pertemuan 6 : Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
- Pertemuan 7 : Pendekatan Analisis Kebijakan: Analisis kebijakan di bidang pendidikan (kebijakan karier guru/pengawas; kebijakan peningkatan mutu pendidikan; dsb)
- Pertemuan 8 : latar belakang, permasalahan
- Pertemuan 9 : teori, kisi-kisi
- Pertemuan 10 : pengembangan instrumen
- Pertemuan 11 : kebijakan (lapangan)
- Pertemuan 12 : kebijakan (lapangan)
- Pertemuan 13 : kebijakan (lapangan)
- Pertemuan 14 : pengolahan data
- Pertemuan 15 : interpretasi data
- Pertemuan 16 : presentasi

Catatan: dapat berubah sesuai kesepakatan

Contoh kajian kebijakan di bidang karier:

Bab 1 : PENDAHULUAN

1. Latar belakang penelitian (dasar kebijakan, teori, empiris)
2. rumusan dan identifikasi masalah (apakah formulasi, implem, dan monev dilakukan berdasarkan tujuau, sasaran, d mekanisme?): formulasi sesuai dg..., impelemntasi, swot serta dampak apa yg dihasilkan
3. maksud dan tujuan penelitian
4. kegunaan penelitian
5. kerangka pemikiran dan hipotesis kerja
(SESUAI UPI)

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. kebijakan public dibidang pendidikan
 1. pengertian kebijakan
 2. pengertian kebijakan public dibidang pendidikan
 3. analisis kebijakan public dibidang pendidikan
 4. formulasi kebijakan public dibidang pendidikan
 5. monitoring dan evaluasi kebijakan public dibidang pendidikan
- B. tinjauan konsep utama
- C. kebijakan public dibidang.....

Bab III : METODE PENELITIAN

SESUAI UPI

Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Deskripsi Formulasi
 - 2. Deskripsi Implementasi
 - 3. Deskripsi Evaluasi
- B. Pembahasan
 - 1. Deskripsi Formulasi
 - 2. Deskripsi Implementasi
 - 3. Deskripsi Evaluasi

Bab V : kesimpulan dan saran

- A. kesimpulan
- B. saran

daftar pustaka

lampiran

Misalnya: kebijakan karier:

A. Formulasi:

1. Aspek: peningkatan mutu, rasa aman, penghargaan, promosi, kesempatan berkembang.
2. Ruang lingkup: (kajian prosedur karier peg: rekrutment dst.)
3. Dasar pertimbangan
4. Tujuan dan sasaran
5. Kriteria
6. Mekanisme
7. Dukungan SIM

B. Implementasi

1. disseminasi/komunikasi
2. pemahaman
3. persepsi
4. koordinasi
5. Penanganan Masalah

C. Evaluasi

1. Kekuatan
2. Kelemahan
3. Peluang dan tantangan
4. Dampak

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE -1

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Pentingnya Kebijakan dalam Pembangunan Pendidikan

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memahami pentingnya kebijakan pendidikan dan implikasinya terhadap pembangunan pendidikan Indonesia

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan latar belakang perlunya kebijakan pendidikan 2. Menjelaskan alasan pentingnya kebijakan pendidikan	Kebijakan pendidikan diperlukan karena - kompleksitas kehidupan - tak memadainya kemampuan masyarakat Alasan pentingnya kebijakan disebabkan oleh potensi konflik seperti penerjemahan agama dan kepercayaan, adat istiadat, suku, daerah, ras, masuknya budaya luar, responsi atas kemajuan organisasi, intervensi pemerintah, tuntutan dunia usaha dan pekerjaan	Ceramah Responsi Ceramah Responsi	LCD/ OHP

PERTEMUAN KE 2

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Konsep Kebijakan Pendidikan

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memahami konsep kebijakan pendidikan

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Setelah mempelajari perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat : - Menjelaskan batasan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan diartikan : <ul style="list-style-type: none"> - Ketetapan-ketetapan, tindakan-tindakan yg diambil pemerintah scr konsisten. - Tujuan, program, keputusan, UU, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, rancangan besar. - Kebijakan berdasar ahli : 	Ceramah, tanyajawab, diskusi	LCD/ OHP

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
	<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir komponen kebijakan pendidikan - Membedakan kebijakan pendidikan dan kebijakan negara - Menjelaskan keterkaitan system politik kebijakan pendidikan - Mengkatagorikan tingkat-tingkat kebijakan pendidikan 	<p>Jones, Pall, William,Dunn,Dyer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pendidikan • Komponen Kebijakan Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Goal, tujuan yang diinginkan. - Plan, atau proposal. - Program - Decision - Effect <p>Unsur-unsur dalam batasan kebijakan : aktor, keadaan yang spesifik, tujuan</p> <p>Kebijakan negara adalah kebijakan yang ditujukan bagi pengatur masalah-masalah umum/publik dan pendidik merupakan masalah publik.</p> <p>Sistem politik yang berlaku dalam negara terkait dengan kebijakan yang dibuat termasuk kebijakan pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian system pendidikan - Sistem politik membentuk dan menghasilkan lembaga-lembaga yang memproduk kebijakan. - Lembaga-lembaga politik : Rule making, application of rule, statement of dyspites. <p>Tingkat kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - National policy level - General policy level - Special policy level - Technical policy level 	<p>Ceramah, tanyajawab, diskusi, assignment</p> <p>Ceramah, tanyajawab, diskusi, assignment</p> <p>Ceramah, re sponsi, assignment</p> <p>Ceramah, responsi</p>	<p>LCD/ OHP</p> <p>LCD/ OHP</p> <p>LCD/ OHP</p> <p>LCD/ OHP</p>

PERTEMUAN KE 3

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Analisis Kebijakan

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memahami Konsep Analisis Kebijakan

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Setelah mempelajari perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat : - Menjelaskan batasan	Analisis Kebijakan diartikan sebagai	Ceramah,	

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
	Analisis Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> ❑ suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan (E.S. Quade) ❑ Menurut William Dunn, analisis kebijakan publik merupakan suatu proses untuk mentransformasikan informasi-informasi kebijakan. 	tanyajawab, diskusi Ceramah, tanyajawab, diskusi	LCD/OHP LCD/OHP

PERTEMUAN KE 4

D. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Perumusan dan Pengesahan Kebijakan

E. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memahami perumusan dan pengesahan kebijakan pendidikan

F. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	<p>Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan proses perumusan kebijakan ✚ Menjelaskan pengesahan kebijakan. ✚ Menyebutkan factor-faktor perumusan kebijakan. ✚ Mengidentifikasi lingkungan kebijakan pendidikan ✚ Mengidentifikasi Masalah dan agenda kebijakan pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses perumusan kebijakan : Perumusan , Penyusunan Agenda, Membuat proposal, Pengesahan rumusan. 2. Pengesahan kebijakan merupakan legalitas yang mengikat. 3. Aktor-aktor perumusan kebijakan : Eksekutif, legislative, Administrator, Parpol, Interst group, Organisasi Masa, Perguruan Tinggi, Tokoh perorangan. 4. Lingkungan kebijakan pendidikan : Kondisi Sumber, Iklim, Demografi, Budaya politik, Struktur Sosial, Kondisi Sosial Ekonomi. 5. Membedakan fenomena, gejala, masalah. <ul style="list-style-type: none"> ✚ Masalah kebijakan terdiri atas masalah prosedural, substansial dan masalah distributive. 	Ceramah, tanyajawab, responsi, assignment, diskusi kecil	LCD/OHP

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menjelaskan alasan perlunya pengesahan ✚ Menjelaskan batasan legimitasi ✚ Merinci proses pengesahan kebijakan pendidikan ✚ Mengidentifikasi problem-problem pengesahan kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Agenda kebijakan adalah masalah-masalah dengan syarat-syarat : Sifat luar biasa, berkaitan dengan kepentingan penguasa, diaungkap oleh media masa 6. Perlunya pengakuan dari masyarakat. 7. Tanggungjawab atas hasil pelaksanaan. Legitimasi menyangkut dua makna : <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pemberian kewenangan untuk memberikan usulan ✚ Memberikan kewenangan untuk melaksanakan proposal yang diusulkan. 8. Proses pengesahan melalui : Rakyat langsung, tokoh-tokoh kunci masyarakat, koalisi. 9. Problema : Resistensi dari eksekutif aktif, resistensi dari kelompok konservatif, dampak dari eks aktif kelompok konservatif, resistensi dari kelompok yang punya visi, persepsi dan kepentingan yang berbeda. 		

PERTEMUAN KE 5

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Sosialisasi kebijakan pendidikan

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memahami dan memiliki keterampilan komunikasi kebijakan pendidikan.

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	- Menjelaskan Alasan-alasan perlunya komunikasi kebijakan pendidikan.	Alasan : Tidak terjadi barrier, terbentuk permasalahan, efektifitas pelaksanaan.	Ceramah, tanya jawab, responsi,a	LCD/OHP

	<ul style="list-style-type: none"> - Mendefinisikan komunikasi kebijakan pendidikan - Menjelaskan model komunikasi kebijakan pendidikan. - Mengidentifikasi problema kebijakan pendidikan. 	<p>Sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegimitasi.</p> <p>Model komunikasi : satu arah/top down, interaksi, transaksi.</p> <p>Problem komunikasi :Berasal dari komunikator, dari pesannya</p>	ssignment, diskusi kecil	
--	---	--	--------------------------	--

PERTEMUAN KE 6

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Implementasi kebijakan pendidikan

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memahami konsep dan memiliki kemampuan mengimplementasikan kebijakan pendidikan dengan baik.

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	<ul style="list-style-type: none"> - Mendefinisikan implementasi kebijakan pendidikan - Mengidentifikasi aktor-aktor pelaksana kebijakan pendidikan. - Menjelaskan arena kebijakan pendidikan - Menjelaskan jenis-jenis kebijakan pendidikan. - Menjelaskan factor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan 	<p>Implementasi merupakan pengupayaan agar rumusan-rumusan kebijakan pendidikan berlaku didalam praktek</p> <p>Aktor-aktor : Perumus kebijakn, pelaksana, mediator, parpol, interst group, ormas, tokoh perorangan, media masa.</p> <p>Arena pelaksana kebijakan merupakan wewenang yang terdiri atas: wewenang tradisional, legal-rasional/birokratis, karismatik.</p> <p>Jenis kebijakan : Substantive policies, procedural policies, distributive policies, redistributive policies, regulatory policies, self regulatory policies, material policies, symbolic policies, collective policies, private good policies, liberal policies, conservative policies.</p> <p>Faktor-faktor yang berpengaruh : Kompleksitas kebutuhan, Ketidakjelasan masalah kebijakan, sumber-sumber potensial, keahlian pelaksana kebijakan, dukungan dari kelompok sasaran, factor</p>	Ceramah, responsi, assignment	LCD/OHP

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
	pendidikan. - Menjelaskan hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan. - Menjelaskan pendekatan-pendekatan pelaksana kebijakan pendidikan.	efektifitas-efisiensi birokrasi. Ada empat model hubungan : Teknokratis, Utusan yang diberi wewenang, penjual dan pembeli, wiraswasta birokratis. Empat pendekatan yang digunakan : Struktural, prosedural/manajerial, keperilakuan, politik.		

PERTEMUAN KE 7

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Pendekatan/Metode analisis kebijakan.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Memahami pendekatan dalam analisis kebijakan pendidikan dan dapat menerapkannya dalam menganalisis kebijakan pendidikan.

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	- Mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan empiris - Menjelaskan pendekatan/metode evaluative - Menjelaskan pendekatan/metode normative/deskriptif.	Suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan untuk menerangkan sesuatu gejala yang terjadi didalam masyarakat. Menerangkan apa adanya hasil dari suatu upaya yang dilakukan oleh suatu program dengan menggunakan criteria. Menawarkan suatu norma/kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Pendekatan normative untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kebijakan.	Ceramah, responsi, assignment.	LCD/OHP

PERTEMUAN KE 8

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Proses analisis kebijakan.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa menguasai dan memiliki kemampuan dalam proses analisis kebijakan pendidikan

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Mahasiswa dapat menjelaskan proses analisis kebijakan pendidikan.	Proses analisis kebijakan terdiri atas : Perumusan masalah, pemantauan, prakiraan, evaluasi, rekomendasi, pengumpulan praktis.	Ceramah, responsi, assignment.	OHP

PERTEMUAN KE 9

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Evaluasi kebijakan pendidikan

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan alasan kebijakan pendidikan - Mendefinisikan evaluasi kebijakan pendidikan 	<p>Alasan evaluasi sesuai dengan tujuan/maksud dari evaluasi : mengetahui hal-hal yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan atau tidak, berhasil atau belum, kelebihan/kekurangannya, implementasinya, dampaknya, resiko-resikonya, langkah-langkah perbaikannya.</p> <p>Suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui seberapa jauh suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan criteria-kriteria yang telah ditetapkan serta memberikan dampak nyata terhadap khalayaksesuai dengan yang diinginkan. Waktu: (linier, komprehensif) substansi: (dasar, menengah, dikti)</p>	Ceramah, Responsi, Assignment	LCD/OHP

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan macam-macam evaluasi kebijakan pendidikan - Menjelaskan karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan - Menginventarisir vaktor-vaktor evaluasi kebijakan pendidikan - Mengidentifikasi problem-problem evaluasi kebijakan pendidikan. 	<p>Periodisasi Evaluasi : (repelita ke enam tahun pertama, kedua, ketiga dst. Kriteria (Standar, Normatif) Sasaran (Proses, Dampak) Kontinuitas (Formatif, Sumatif) Berdasar ahli (Anderson : Impresionistis, Operasional, Sistematis. Dunn : Semu, Resmi, Teori keputusan)</p> <p>Karakteristik (Tak bebas nilai, berorientasi pada masalah, berorientasi masa lalu dan sekarang, berorientasi pada dampak)</p> <p>Aktor formal dan non formal</p> <p>Problem : tidak jelas, cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran, tidak jelas masalah, sumber-sumber gejala masalah, terkaitnya masalah satu dengan yang lainnya, subyektifitas masalah kebijakan.</p>		

PERTEMUAN KE 10

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Perkembangan histories

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memahami perkembangan histories kebijakan pendidikan di Indonesia

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kebijakan pendidikan zaman belanda - Mengidentifikasi kebijakan pendidikan zaman jepang - Mengidentifikasi kebijakan pendidikan 	<p>Produk kebijakan zaman belanda</p> <p>Produk kebijakan zaman jepang</p> <p>Produk kebijakan zaman kemerdekaan : UU No.4/1950 jo UU No.12/1954</p>	Veramah, responsi, assignment	OHP

	zaman kemerdekaan	UU No.2/1989 dan PP-nya, UUSPN no. 2/89 UU SISDIKNAS NO 20/2003		
--	-------------------	--	--	--

PERTEMUAN KE 10-15

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Kebijakan pokok pembangunan nasional

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memahami kebijakan pokok pembangunan nasional.

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

No	Tujuan Instruksional Khusus	Uraian Materi Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan	Media dan Alat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Menjelaskan kebijakan pokok pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan - Efisiensi - Kualitas - Efisiensi 	Veramah, responsi, assignment	LCD/ OHP
11	Menjelaskan konsep wajib belajar Menganalisis kebijakan wajib belajar sembilan tahun	Wajib belajar pendidikan dasar adalah kewajiban belajar pada SD da SLTP Evaluasi terhadap perumusan wajib belajar, implementasi dan dampaknya terhadap pembangunan pendidikan kita	diskusi	
12	Menjelaskan konsep Otonomi daerah Menganalisis kebijakan Otda dalam bidang pendidikan	Pengertian mekanisme dan distribusi proses authority Evaluasi terhadap kebijakan Otda mulai dari rumusan, implementasi sampai evaluasi Otda.	diskusi	
13	Menjelaskan konsep link and match Menganalisis kebijakan link and match pada SD,SLTP,SMU	Link berkaitan dengan tujuan pendidikan tiap jenjang dengan jenjang selanjutnya. Match berkaitan dengan kesepadanan antara tujuan dengan relevansinya dengan kemajuan. Analisis terhadap kebijakan Link and Match terutama pada implementasinya.	diskusi	
14	Menjelaskan kebijakan Ebtanas Menganalisis implementasi kebijakan EBTANAS	Kebijakan EBTANAS adalah kebijakan penilaian akhir yang distandarisasi secara nasional Analisis implementasi kebijakan : Keberhasilan, kelemahan dan factor-faktor yang mempengaruhinya.	diskusi	

	Menganalisis dampak kebijakan EBTANAS terhadap mutu pendidikan	Analisis Dampaknya pada peningkatan mutu pendidikan.		
15 dan kajian kebijakan di tabel ini sesuai dengan kajian mandiri siswa. Dengan demikian bersifat fleksibel dan adaptif dengan konsentrasi mahasiswa.				

BAB I

PENTINGNYA KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. LATAR BELAKANG PERLUNYA KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Kebijakan lahir seiring dengan bertambah banyaknya populasi manusia dan kompleksitas kebutuhan, kepentingan dan tuntutan kehidupan. Perlakuan terhadap anggota masyarakat tidak lagi bisa terjadi secara orang perorang. Untuk tetap dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup, manusia membuat peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa maupun atas kesepakatan diantara mereka untuk dipatuhi, dilaksanakan dan diawasi bersama.

Perjalanan kehidupan manusia yang dimulai dari adanya Adam Hawa sampai kini berjumlah lebih dari 2 milyar merupakan sejarah panjang yang telah melahirkan berbagai "hasil budaya" yang salah satunya adalah adanya prinsip-prinsip yang dipahami sebagai suatu disiplin untuk mengadministrasikan keberadaan organisasi dan permasalahan-permasalahannya dengan segala kearifan dan kebijaksanaan (policies).

Pada mulanya, Kebijakan lahir karena ingin memberi aktifitas-aktifitas yang bermakna bagi masyarakat untuk tetap dapat mewariskan nilai-nilai budaya pada generasi penerusnya. Namun seiring dengan semakin bervariasinya kebutuhan dan tuntutan yang melahirkan berbagai permasalahan dan dengan berkembangnya kajian-kajian keilmuan administrasi dan kebijakan. Kebijakan menjadi suatu keputusan-keputusan sebagai ketetapan yang mengikat warganegara dan ditunjukkan untuk memecahkan masalah-masalah pelik, 'sering terjadi' dan bersifat umum.

Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi pendahulunya ke generasi penerusnya agar tetap terpelihara, terjaga dan dikembangkan. Untuk itu, keberadaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran yang diemban pemerintah sebagai penguasa. Hal ini disebabkan karena kompleksitas penyelenggaraan, substansi dan keberlanjutan (*sustainability*) pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat beragam dan membutuhkan campur tangan penguasa/pemerintah untuk memelihara dan mengembangkannya secara terintegrasi dan berkualitas.

Di samping itu, masyarakat memiliki keterbatasan sedangkan pemerintah memiliki kekuatan (power) dan kewenangan (authority) yang dapat menjamin keberadaan dan keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan dalam proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai dengan pertentangan dan konflik serta dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang sulit ditangani masyarakat dan intervensi pemerintah berupa kebijakan diharapkan menjadi solusi terbaik.

B. ALASAN PENTINGNYA KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Berbagai alasan pentingnya kebijakan pendidikan adalah karena pendidikan merupakan hajat hidup orang banyak yang substansi dan penyelenggaraannya sangat beragam. Pendidikan sangat berkaitan dengan nilai-nilai seperti agama, kepercayaan, adat istiadat, suku/ras, ekonomi, sosial budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan.

Sebagai hajat hidup orang banyak yang nilainya sangat beragam, pendidikan dihadapkan pada berbagai masalah. Baik pada masalah pertentangan atau konflik nilai-nilai maupun masalah penyelenggaraan dan kualitasnya. Satu masalah berkaitan dengan masalah lainnya. Satu penyelesaian yang parsial berpengaruh pada timbulnya masalah pada

komponen lain. Begitu rumit dan kompleksnya memecahkan masalah pendidikan bila ditangani secara parsial dan oleh kalangan terbatas.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan sangat penting keberadaannya sebagai power untuk menancapkan pengaruhnya agar pendidikan dapat dikelola dengan memenuhi harapan masyarakat sesuai agama, kepercayaan, tingkat ekonomi dan status sosial, politik, keamanan, budaya, tuntutan pekerjaan dan kemajuan, dan kepentingan pemerintah. Artinya pertimbangan dilahirkannya kebijakan pendidikan haruslah memperhatikan berbagai dimensi dan persoalan-persoalan yang krusial darimasyarakat, pemerintah dan tuntutan jaman.

C. SEJARAH KEBIJAKAN

Sejarah kebijakan sebagai suatu studi, baru dimulai tahun 1930-an di USA pada waktu New Deal mengundang keterlibatan para sarjana dan ahli ilmu pengetahuan untuk merumuskan kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah publik.

Tahun 1937 universitas Harvard mengembangkan program pascasarjana dalam bidang administrasi negara yang salah satu konsentrasinya pada *public policy*. Saat itulah, kebijakan dikukuhkan sebagai disiplin ilmu dan menjadi titik tolak berkembangnya studi kebijakan dibidang ekonomi politik dan administrasi negara. Namun ruang lingkup, substansi, pendekatan, prosedur, metodologi dan manajemen operasionalnya belum menunjukkan "body of knowledge" yang mapan.

Akhir tahun 1940-an dibentuk suatu panitia yang beranggotakan dosen-dosen kebijakan pada universitas di USA yang bertugas untuk mengembangkan materi ajar yang baik dan relevan bagi studi kebijakan dan administrasi negara. Sejak saat itu, penelitian dan studi kebijakan mulai bermunculan dan direspons oleh berbagai negara.

Pada dunia pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan mulai terkenal tahun 1990-an dengan adanya program studi Administrasi Pendidikan.

BAB II

KONSEP KEBIJAKAN PENDIDIKAN

1. PENGERTIAN KEBIJAKAN BERDASARKAN ASAL USUL KATA

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dijelaskan Poerwadarminta. Kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Jadi kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran.

Dalam bahasa Arab, dikenal dengan kata *Arif* yang artinya tahu/mengetahui; cerdik/pandai/berilmu. Dengan demikian seorang yang bijak adalah seorang yang arif yang pandai dan berilmu dalam bidangnya.

Dalam bahasa Belanda terdapat kata "*beleid*" yang diartikan sebagai "*bestuur*" (pemerintahan), "*overleg*" (pertimbangan/pemikiran); atau *omzichtigheid* (hati-hati). Jadi orang yang bijak adalah pemerintahan yang memiliki pemikiran yang hati-hati tentang suatu hal.

- Dalam bahasa Inggris, kebijakan diambil dari istilah "*policy*" yang berarti **kebijakan** Latin: *politeia*; pemerintahan
- A settled course adopted and followed by a government (*suatu cara yg ditpkn, dibuat & dilaksn o/ pmrnt, perorangn, klmpk, dsb*)

, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran.

2. PENGERTIAN KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

Eula dan Prewatt (1973:2) mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah 'ketetapan yang berlaku' yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mememanfaatkannya. Senada dengan pengertian tersebut, Jones (1996:47) menyebutkan bahwa kebijakan merupakan 'keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut'.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan merupakan ketetapan yang dilaksanakan secara konsisten dan berulang oleh pembuat maupun yang melaksanakannya. artinya pelaksanaan kebijakan tidak hanya berada pada tanggung jawab pelaksana tetapi ada hubungan timbale balik antara pembuat dan pelaksana. Menegasakan pernyataan tersebut Nakamura dan Smallwood (1980:23) mengemukakan pendapatnya bahwa :

Tidak terdapat perbedaan yang jelas antara 2 jenis aktivitas yang digambarkan melalui perkataan "pembuatan kebijakan" dan "penerapan kebijakan" karena mereka yang terlibat dikedua arena tersebut dapat saling berintervensi kesalah satu area.

Pengertian lain yang lebih mengacu pada arti kebijakan sebagai keputusan untuk mencapaitujuan-tujuan tertentu, seperti pada definisi Jenkins (1978:15) yaitu "serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait..., berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu".

Mustopadidjaja (1988:30) mengemukakan bahwa `istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku Negara pada umumnya". Hal tersebut ditegaskan pula oleh Wahab (1991:13) bahwa "kebijakan dapat pula bermakna sebagai tindakan politik, atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah atau actor terhadap suatu masalah". Menurut Anderson (1979) kebijakan atau "*policy*" itu adalah sebagai berikut:

A purpose course of action followed by an actor or set of actors or set of actors in dealing with a problem or matter of concern. This concept of policy focuses attention in what is actually done against what is proposed or intended and it defferentieates a policy from a decision

House dan Coleman (1980) mengartikan kebijakan sebagai suatu prinsip pemerintahan, rencana atau serangkaian tindakan sebagai, `suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada tujuan atau suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan'. Lebih jauh dinyatakan bahwa, 'kebijakan lebih menekankan

pada apa yang nyata-nyata dikerjakan ketimbang yang diusulkan atau yang dikehendaki'.

Pengertian-pengertian tersebut menekankan kepada tindakan atau serentetan tindakan yang diambil dalam menggarap suatu urusan atau masalah.

Supandi dan Sanusi (1988:14) menyimpulkan tentang kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan itu harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu: *pertama*, adanya actor, orang atau orang-orang tertentu pelantara (agen) yang mempunyai kewajiban bertindak bila menghadapi suatu keadaan. *Kedua*, keadaan yang spesifik yang mungkin sering terjadi. *Ketiga*, adanya suatu tujuan yang akan dicapai melalui tindakan tersebut. Dengan kata lain tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu kebijakan apabila tindakan itu terjadi secara berulang-ulang demi satu tujuan tertentu.

Hogwood dan Gun (1986:13-9) telah mengelompokan aneka ragam penggunaan istilah kebijakan ke dalam sepuluh macam yaitu:

- (1) policy as a label for a field of activity
- (2) policy as an expression of general purpose or desired state of affairs
- (3) policy as specific proposals
- (4) policy as decision of government
- (5) policy as formal authorization
- (6) policy as a programme
- (7) policy as output
- (8) policy as a outcome
- (9) policy as a theory or model
- (10) policy as a process

Dari beberapa kelompok ahli yang mendefinisikan kebijakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang arti kebijakan sebagai berikut:

- 1) kebijakan sebagai ketetapan yang dilaksanakan secara konsisten dan berulang oleh pembuat maupun yang melaksanakannya
- 2) kebijakan sebagai ketetapan yang dijadikan pedoman berperilaku bagi organisasi
- 3) kebijakan sebagai tindakan atau serentetan tindakan yang diambil pemerintah/atasan dalam menggarap suatu urusan atau masalah.

3. Pengertian Kebijakan Publik

Setelah memahami arti kebijakan, maka tidak dengan sendirinya dapat mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan masyarakat, karena banyak aspek yang terkait dan komponen yang harus dipertimbangkan dalam mendefinisikan kebijakan publik.

Dye (1987:33) menyatakan bahwa "public policy is whatever governments choose to do or not to do". Sedangkan Edwards dan Sharkansky dalam Islami (1988:20) mengemukakan bahwa 'public policy is what the government say to or not to do'. Kedua definisi tersebut merujuk pada apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan public adalah usaha-usaha untuk memahami dan memberi arti bahwa apa (1) yang dilakukan/tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai sesuatu masalah; (2) yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya; dan (3) pengaruh dan dampak dari kebijakan public tersebut.

Dunn (1981:3) mendefinisikan kebijakan public sebagai berikut: "the process of producing knowledge of and in policy processes". Rose dalam Dunn, (1981:46-47) bahwa "public policies which are long series of more or less related choices (including decisions not to act) made by governmental bodies and officials". Sedangkan Peter dalam Kartasmita (1995:2-3) kebijakan public adalah "totalitas kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung melalui pihak lain yang berpengaruh pada kehidupan penduduk di negara itu. Pal (1996:2) mendefinisikannya sebagai "a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems" (melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dipilih oleh pejabat-pejabat public dalam mengatasi sesuatu masalah atau serangkaian masalah).

Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan public merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu

undang-undang atau peraturan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Setiap kebijakan negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan keberadaan negara tersebut. Negara dengan segala fungsinya berhak untuk membuat atau tidak membuat kebijakan. Berkenaan dengan hal itu, Hoogerwerf (1983:9) mengemukakan tentang tujuan kebijakan negara sebagai berikut:

Tujuan kebijakan negara meliputi 4 hal; *pertama*, memelihara ketertiban umum (negara sebagai *stabilisator*); *kedua*, melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai *stimulator*); *ketiga*, menyesuaikan berbagai aktivitasn (negara sebagai *koordinator*); dan *keempat*, mempersatukan berbagai materi (negara sebagai *alokator*).

Singadilaga (1996:25) mengisyaratkan beberapa implikasi pengertian kebijakan publik yaitu:

- 1) *public policy* itu dalam bentuk awalnya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah baik untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu.
- 2) *Public policy* tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata
- 3) *Public policy* melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu dilandasi oleh maksud dan tujuan tertentu.
- 4) *Public policy* merupakan sebuah sistem yang dipengaruhi dan mempengaruhi faktor lain

Kebijakan publik merupakan suatu disiplin ilmu yang dinamis. Dinamisasi ilmu ini disebabkan karena kajian tentang kebijakan akan menyangkut sistem sosial dan pranata kehidupan manusia yang unik dan selalu berubah setiap zaman.

Kebijakan publik akan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan sebagai umpan balik untuk kembali merumuskan kebijakanyang sesuai. Pendekatan yang umumnya dipengaruhi oleh pendekatan sistem akan berupaya menjelaskan saling keterpaduanantara lingkungan sistem politik dan kebijakan publik

Selain melalui pendekatan sistem, perlu juga dilakukan pendekatan melalui analisis proses, seperti dikemukakan oleh dye dan Jones yang diistilahkan oleh Dye (1987:24-26) sebagai "*black box*", dengan analisis proses ini dapat dijelaskan adanya keterkaitan antara lingkungan, sistempolitik dan kebijakannegara yang sekaligus memahami apa yang berlangsung dalam sistem politik itu sendiri.